

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Kebijakan di bidang olahraga dalam kerangka sistem memerlukan evaluasi dan kajian secara komprehensif dalam rangka memberikan refleksi tentang bagaimana proses telah efektif dijalankan serta menentukan tingkat keberhasilan dari sebuah kebijakan (Ramos, Bosscher, Pankowiak, & Valleser, 2023, Österlind, 2016). Kebijakan olahraga nasional saat ini mengacu pada undang-undang nomor 11 Tahun 2022 tentang keolahragaan yang baru saja diterbitkan oleh pemerintah. Kebijakan tersebut merupakan konsep, peraturan dan payung hukum dalam rangka menciptakan sistem tata kelola (*governance*) pada bidang olahraga di Indonesia.

Kebijakan nasional di bidang olahraga merupakan dasar dan kerangka acuan dalam menyelenggarakan pengembangan olahraga yang ada di daerah. Hal tersebut berfungsi untuk menyederakan implementasi kebijakan yang ada ditingkat pusat hingga tingkat daerah agar ketercapaian dan efektifitas dari kebijakan dapat dilakukan secara optimal dan maksimal. Pada konteks kebijakan olahraga nasional tentu tidak dapat dilepaskan dari payung hukum tertinggi yaitu undang-undang dasar 1945 sebagai landasan dalam pengembangan dan pembangunan olahraga nasional (Ma'mun, 2014).

Olahraga dalam lingkup kehidupan berbangsa dapat menjadi salah satu upaya dalam berperan serta mengemban amanah Undang-undang Dasar 1945 (Dwiyogo, 2009) dimana olahraga tidak sekedar menjadi sebagai aktifitas fisik masyarakat semata, olahraga merupakan simbol kemajuan sebuah bangsa (Indrawan & Aji, 2019), keunggulan (*Nation State*) (Qomarrullah & Lestari, 2022) serta sebagai sarana pembangunan sebuah bangsa (Ramadhan et al., 2020)

Olahraga memiliki peranan yang sangat penting bagi eksistensi suatu bangsa. (Utami, 2015), Menurut Holt, Pankow, & Jørgensen (2020) olahraga sebagai bagian integral dari proses pembangunan nasional baik dalam konteks

pembangunan melalui olahraga (*Development through Sport*) maupun olahraga untuk pembangunan (*Sport for Development*) (Schulenkorf et al., 2016). Olahraga berperan erat dalam pembangunan bangsa khususnya pada aspek pengembangan aspek positif pemuda (*positive youth Development*) (Holt et al., 2020) dan pembangunan karakter bangsa (*national character building*) (Lumpkin, 2011) serta olahraga merupakan sektor peningkatan daya saing bangsa sebagai bangsa yang maju (Levina & Kagramova, 2022).

Melihat pada beberapa hal diatas maka perlu kajian dan analisis terkait dengan kebijakan pada sektor olahraga ditingkat pusat dan daerah. Keberadaan olahraga masih belum menjadi prioritas dalam perencanaan pembangunan secara nasional (Muryadi, 2019, Rahadian & Ma'mun, 2018). Paradigma pengembangan olahraga masih mengalami disorientasi sekedar pada target capaian medali atau prestasi semata. Padahal jika dikaji secara mendalam peran olahraga dalam pembangunan berbagai sektor memiliki banyak kebermaknaan dan kebermanfaatan.

Dari paradigma yang ada tersebut dapat kita lihat pada kenyataannya Provinsi Jawa Tengah justru menunjukkan prestasi selalu di bawah DKI Jakarta, Jawa Timur dan Jawa Barat dalam penyelenggaraan PON. Pada pelaksanaan PON XX Papua tahun 2021 Provinsi Jawa Tengah memiliki target 60 medali emas, namun dalam pelaksanaannya masih tidak sesuai dengan target yaitu 27 medali emas dan mengalami penurunan peringkat dari peringkat 4 ke peringkat 6.

Berdasarkan data KONI Provinsi Jawa Tengah berikut ini capaian perolehan medali sejak penyelenggaraan PON XV di Surabaya sebagai berikut:

Tabel 1. 1. Perolehan Medali Jawa Tengah di Ajang PON

No	Tahun/Tempat	Emas	Perak	Perunggu	Peringkat	Target Medali
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	PON XV/2000 (Surabaya)	42	62	65	4	40
2	PON XVI/2004 (Palembang)	56	57	64	4	56
3.	PON XVII/2008 (Kaltim)	53	81	80	5	60
4.	PON XVIII/2012 (Riau)	47	52	69	4	60
5.	PON XIX/2016 (Jabar)	32	56	85	4	60
6	PON XX/2021 (Papua)	27	45	64	6	45

(Sumber: KONI Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022)

Beberapa permasalahan yang menjadi faktor rendahnya capaian prestasi olahraga di Jawa Tengah pada penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional antara lain pengembangan olahraga prestasi yang belum menjadi salah satu prioritas kebijakan pemerintah provinsi Jawa Tengah (Gunawan, Ardi; Junaidi, 2019). Pengembangan olahraga belum menjadi prioritas seperti pada persentase alokasi anggaran penyelenggaraan program olahraga serta kebijakan yang mendukung pengembangan olahraga prestasi yang masih lemah (Nanu Ade, 2018). Selanjutnya adalah konsistensi dari implementasi penyelenggaraan keolahragaan melalui Perda nomor 4 tahun 2012 tentang penyelenggaraan keolahragaan maupun Peraturan Gubernur nomor 4 tahun 2018 tentang pelaksanaan Perda penyelenggaraan keolahragaan (Hamzah, 2018).

Model pengembangan secara menyeluruh mulai dari pembinaan bibit atlet, atlet potensial hingga atlet elit yang dilaksanakan masih belum konsisten (Setiawan & Faza, 2019), terintegrasi dan menjadi satu kesatuan program (Parena et al., 2017). Menurut Widodo, Santoso, & Rengga (2012) orientasi pembinaan yang selama ini berjalan berorientasi pada program pemusatan latihan seperti PPLOP, PSOJP dan Pemusatan Latihan Jangka Panjang yang hasilnya dirasa belum optimal menghasilkan atlet berprestasi internasional (Muhlisin, 2016). Masih banyak cabang olahraga yang belum memiliki daya dukung pembinaan baik dari sektor pemerintah maupun sektor swasta dalam membina atlet.

Dukungan anggaran dalam pengembangan olahraga dikatakan masih sangat terbatas (Junaidi, Subiyono, et al., 2021). Keterbatasan dukungan anggaran untuk memenuhi kebutuhan pembinaan atlet jangka panjang dan sistem pengembangan sentra pembinaan belum dapat memenuhi kondisi yang ideal. Efisiensi dan efektifitas anggaran belum dapat dikelola menjadi solusi keterbatasan anggaran oleh pemerintah di bidang olahraga (Abdilah et al., 2023). Serta lemahnya sektor industri dalam pengembangan olahraga di Jawa Tengah (Priyono, 2012).

Tata Kelola (*governance*) dan struktur kebijakan (*structure of police*) merupakan bangunan dasar dalam pengelolaan keolahragaan yang mengatur, mengelola dan menyelenggarakan segala sumber daya yang ada dalam kesuksesan

dan keberhasilan kebijakan olahraga (Houlihan et al., 2010). Tata kelola dan struktur kebijakan memerlukan preferensi, konsensus serta intervensi yang kuat agar sumber daya yang ada dapat dikelola secara maksimal dan optimal (Gunawan, Ardi; Junaidi, 2019).

Kelemahan pada kebijakan di Jawa Tengah pada aspek partisipasi olahraga elit adalah pada tataran inisiasi dan pondasi yang masih sangat rapuh (Soegiyanto, 2013). Rendahnya partisipasi pada level pemasaran dan *grassroot* sebagai akibat dari pola pengembangan sentra pembinaan yang belum tertata dengan baik (Kristiyanto, 2018). Jumlah sentra pembinaan yang masih rendah dan belum merata merupakan salah satu faktor bagaimana budaya partisipasi olahraga pada level *grassroot* menjadi lemah termasuk keterlibatan pemangku kepentingan termasuk sektor non pemerintah yang masih lemah (Arizaldi, 2020).

Kebijakan dan sistem dalam pengembangan kebijakan olahraga pada aspek pengembangan atlet olahraga memerlukan manajemen yang komprehensif (Sargent Megicks et al., 2021). Menurut Balyi, Way, & Higgs (2013) sistem identifikasi (*identification*) meliputi deteksi bakat (*talent detection*), orientasi bakat (*Talent orientation*) pemanduan bakat (*talent Scouting*), transfer bakat (*talent transfer*) serta seleksi kebijakan (*talent selection*) yang terintegrasi untuk memperoleh bakat atlet yang benar-benar potensial untuk dibina menjadi atlet unggul melalui sistem pengembangan atlet (*talent development*) (Ruchira et al., 2020). Kelemahan kebijakan pengembangan olahraga di Jawa Tengah salah satunya adalah pada dalam proses identifikasi dan pengembangan bakat yang ada pada sentra pembinaan bibit atlet (Widodo et al., 2012) yang belum adanya sentra pembinaan terpusat yang ada di Jawa Tengah.

Dukungan karir atlet dan pasca atlet diperlukan untuk menjamin dan memastikan kehidupan atlet itu sendiri masih menjadi kelemahan di Jawa Tengah (R. F. Prasetyo & Sakti, 2015). Saat menjadi atlet jaminan kesejahteraan, kesehatan dan pendidikan bagi atlet harus menjadi hak yang harus dipenuhi masih (Istyawati, 2018). Tingginya potensi atlet berhenti (*burnout*) sebelum meraih prestasi puncaknya perlu diimbangi dengan pembekalan keterampilan dan

pendidikan yang layak bagi mereka (Syaukani et al., 2020). Sehingga mereka tidak akan mengalami kesulitan berarti dalam kehidupannya setelah berhenti menjadi atlet (Arviyani, 2022). Paling tidak 3 jaminan dalam hal dukungan bagi atlet maupun pasca atlet yang perlu diperhatikan yaitu jaminan kesehatan, jaminan kesejahteraan, jaminan pendidikan yang layak dan jaminan hari tua (Utomo, n.d.).

Pemenuhan kualitas sarana dan prasarana dalam proses latihan bagi atlet merupakan faktor penting dalam pencapaian prestasi (Irawan, 2017). Penyediaan sarana dan prasarana tidak hanya sekedar memberikan fasilitasi partisipasi namun juga harus mampu menciptakan lingkungan yang relevan dan berkualitas tinggi (Putra, 2018). Untuk memenuhi hal tersebut maka diperlukan pemetaan kebutuhan sarana dan prasarana pada sentra latihan baik dipusat dan daerah secara baik. Dengan demikian akan memudahkan pemenuhan kualitasnya melalui sistem standardisasi sarana dan prasarana keolahragaan.

Kualitas dan kuantitas sumber daya manusia khususnya pelatih sangat penting pada tiap tahap dan jenjang pembinaan olahraga yang mengarah pada profesionalisme (Bose-Brill et al., 2023). Dalam pengembangan karir dan jenjang perlu untuk di bina dan di kelola oleh orang yang memiliki kapasitas dan kualitas yang memadai (Das et al., 2024). Untuk dapat memenuhi ketentuan pembinaan (*coaching provision*) dan pengembangan pelatih (*coach development*) dapat dilakukan melalui pelatihan secara terus menerus dan perlunya membangun sistem sertifikasi dan standardisasi pelatih dan tenaga keolahragaan termasuk melakukan afiliasi perguruan tinggi keolahragaan dengan induk cabang olahraga dalam meningkatkan standar mutu lulusan pendidikan kepelatihan olahraga dan tenaga keolahragaan lainnya dalam konteks pelatih dalam industri olahraga (Dawson & Phillips, 2013).

Berdasarkan kebutuhan pelatih Di Jawa Tengah terutama pada bibit atlet dan atlet potensial, masih dihadapkan dengan rendahnya kualitas pelatih yang membina atlet pada level usia tersebut (Hermahayu & Rumini, 2021). Terutama pada tahapan fundamental dan tahap *learn to train* memerlukan kualifikasi pelatih yang mampu mengidentifikasi dan memandu bakat bibit atlet dengan baik.

Padahal secara kualitas SDM pelatih ini akan sangat berdampak terhadap produk hasil atlet binaan yang berkualitas dan berdaya saing pada level selanjutnya di level atlet unggulan.

Kompetisi yang terselenggara di tingkat nasional dan daerah tidak hanya diperlukan untuk menjadi tolak ukur latihan atlet semata, namun harus dipandang sebagai salah satu indikator dan efek positif terhadap keberlangsungan pembinaan olahraga secara makro dan tahapan jangka panjang (Balyi, 2001). Menurut Balyi sinkronisasi dan kajian jaringan kompetisi perlu ditinjau dari aspek tahapan pembinaan, sentra pembinaan, rasio dan kapitalisasi kompetisi. Hal tersebut dikuatkan oleh Woods, McKeown, O'Sullivan, Robertson, & Davids, (2020) penyelenggaraan kompetisi bertujuan agar sistem jaringan kompetisi yang dilaksanakan akan mendukung performa tinggi (*high Performance*) melalui kompetisi elit (*high level competition*). Selain itu jaringan kompetisi berdampak pada partisipasi aktif (*participation*) masyarakat dalam olahraga dengan tujuan menciptakan iklim kompetisi berbasis industri olahraga.

Riset dan inovasi dalam bidang olahraga akan mendukung pendekatan secara ilmiah dalam setiap aspek pengembangan olahraga melalui kegiatan penelitian, pengembangan dan inovasi. Hal tersebut berkaitan dengan sejauh mana data hasil penelitian, pengetahuan, dan inovasi teknologi dapat diterapkan dalam penyelenggaraan kebijakan pengembangan olahraga. Inti dari pilar *scientific research* adalah bagaimana sistem/mekanisme dibangun dalam mengumpulkan dan menyebarkan informasi ilmiah secara sistematis di berbagai bidang seperti identifikasi dan pengembangan bakat, metode latihan, kedokteran, nutrisi, psikologi, fisiologi, biomekanik, dan pembinaan olahraga untuk kepentingan pembinaan atlet (Brouwers et al., 2015).

Kajian analisis dan evaluasi dibidang kebijakan olahraga masih sangat rendah terlihat dari minimnya jenis penelitian dan publikasi berkaitan dengan kebijakan olahraga secara makro di Indonesia (Muhlisin, et al 2021). Hal ini menjadikan kajian tentang tolak ukur pengembangan olahraga melalui kebijakan-kebijakan olahraga masih jarang tersentuh dengan kajian ilmiah. Hal tersebut menjadikan

keberhasilan dari pengembangan olahraga di Indonesia masih sulit untuk diukur secara komprehensif. Penelitian evaluasi kebijakan masih didominasi dengan jenis penelitian-penelitian kualitatif sehingga tolak ukur yang diperoleh masih memiliki tingkat subjektivitas tinggi. Sehingga diperlukan instrument evaluasi terukur untuk dapat memperoleh hasil evaluasi kebijakan yang komprehensif terutama pada pengembangan olahraga elit (*Elite Sport*).

Berdasarkan uraian diatas maka diperlukan solusi permasalahan terhadap lemahnya kajian analisis di bidang olahraga secara komprehensif. *SPLISS Model* adalah sebuah model analisis kebijakan yang dikembangkan oleh de Bosscherr yang digunakan untuk mengevaluasi kebijakan di beberapa negara mau di Eropa. *SPLISS* sebagai analisis faktor kebijakan olahraga menuju kesuksesan olahraga internasional, juga dikenal sebagai model *SPLISS* (De Bosscher et al., 2016) digunakan untuk membandingkan dan menjadi tolok ukur di 15 negara dalam pengembangan olahraga elit; serta mengevaluasi efektivitas kebijakan olahraga elit nasional (De Bosscher et al., 2006).

1.2. Identifikasi Masalah

Produk kebijakan olahraga adalah terciptanya payung hukum dan sistem tata kelola manajemen pengembangan olahraga yang efektif. Identifikasi dalam penelitian dilakukan dengan menganalisis kebijakan makro dan secara mikro pengembangan olahraga prestasi yang ada di Jawa Tengah. Beberapa analisis permasalahan yang diperoleh dari hasil identifikasi antara lain:

1. Arah kebijakan pengembangan olahraga di Jawa Tengah belum dievaluasi secara komprehensif terutama pada faktor-faktor yang mempengaruhi pengembangan atlet elit di Jawa Tengah.
2. Terdapat kelemahan pada kebijakan pengembangan olahraga elit di Jawa Tengah meliputi:
 - a. *Input*: Keterbatasan serta efisiensi dan efektifitas pengelolaan anggaran yang belum optimal;

- b. *Throughput*: (1) Tata kelola dan struktur kebijakan olahraga yang masih lemah, (2) Rendahnya partisipasi dan lemahnya podasi pengembangan olahraga elit di Jawa Tengah, (3) sisten identifikasi dan pengembangan bakat yang belum terskema dengan baik, (4) dukungan dan jaminan keberlangsungan atlet yang masih belum optimal dan belum berbasis pada pengembangan olahraga elit, (5) lemahnya dukungan fasilitas latihan terpusat dan terintegrasi yang mendukung latihan pada performa tinggi, (6) Kualitas dan kuantitas SDM pelatih yang masih lemah, dan (7) Jaringan kompetisi yang belum berkelanjutan, terarah dan belum mengarah pada berkembangnya industri olahraga, dan masih lemahnya dukungan kajian ilmiah (*Sport Science*) dalam pembinaan atlet;
 - c. *Output*: Capaian prestasi pada olahraga elit di Jawa Tengah mengalami penurunan dari capaian prestasi di tingkat nasional pada penyelenggaraan multieven PON. Dan belum optimal dalam menghasilkan atlet berprestasi pada even internasional;
 - d. *Outcome*: Arah kebijakan olahraga masih berorientasi pada pengembangan olahraga pada capaian *Output* atau medali dan kurang memperhatikan aspek dampak dan kebermaknaan olahraga secara luas. Sehingga perlu kajian dan evaluasi mengenai orientasi olahraga di Jawa Tengah.
3. Perlunya kajian ilmiah tentang kebijakan pengembangan olahraga di Jawa Tengah. Evaluasi komprehensif menggunakan faktor kesuksesan atlet elit (9 Pilar *SPLISS Model*) sebagai model evaluasi yang digunakan oleh 17 Negara sukses di Dunia oleh verlee De Booscher.

1.3. Cakupan Penelitian

Berdasarkan identifikasi permasalahan tentang kebijakan pengembangan olahraga prestasi di Jawa Tengah, cakupan penelitian difokuskan pada komponen yang berpengaruh pada pencapaian prestasi olahraga berdasarkan kajian *SPLISS Model* (Bosscher & Universiteit, 2016) antara lain:

1. Kebijakan pengembangan olahraga prestasi ditinjau dari pilar pendanaan (*Financial Support*);
2. Kebijakan pengembangan olahraga prestasi ditinjau pilar organisasi dan struktur kebijakan (*governance, organization & structure of policy*);
3. Kebijakan pengembangan olahraga prestasi ditinjau dari pilar pondasi dan partisipasi (*foundation & participation*);
4. Kebijakan pengembangan olahraga prestasi ditinjau dari pilar identifikasi dan pengembangan bakat (*talent identification & development system*);
5. Kebijakan pengembangan olahraga prestasi ditinjau dari pilar dukungan atlet dan pasca karir atlet (*athlete & post career support*);
6. Kebijakan pengembangan olahraga prestasi ditinjau dari aspek pilar fasilitas latihan (*training facility*);
7. Kebijakan olahraga prestasi ditinjau dari pilar pengembangan SDM Pelatih (*coaching provision and coach development*);
8. Kebijakan olahraga prestasi ditinjau dari pilar sistem kompetisi (*competition structure*); dan
9. Kebijakan olahraga prestasi ditinjau dari pilar penelitian ilmiah dan inovasi (*scientific research and inovation*).

1.4. Rumusan Masalah

Rumusan dalam penelitian mengacu pada identifikasi dan cakupan penelitian. Adapun untuk rumusan masalah disesuaikan dengan 9 pilar *SPLISS Model* yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana evaluasi kebijakan olahraga prestasi di Jawa Tengah ditinjau dari pilar pendanaan (*Financial Support*)?;
2. Bagaimana evaluasi kebijakan olahraga prestasi di Jawa Tengah dari pilar tata kelola organisasi dan struktur kebijakan (*governance, organization & structure of policy*)?;
3. Bagaimana evaluasi kebijakan olahraga prestasi di Jawa Tengah ditinjau dari pilar pondasi dan partisipasi (*foundation & participation*)?;

4. Bagaimana evaluasi kebijakan olahraga prestasi di Jawa Tengah ditinjau dari pilar identifikasi dan pengembangan bakat (*talent identification & development system*);
5. Bagaimana evaluasi kebijakan olahraga prestasi di Jawa Tengah ditinjau dari pilar dukungan atlet dan pasca karir atlet (*athlete & post career support*);
6. Bagaimana evaluasi kebijakan olahraga prestasi di Jawa Tengah ditinjau dari pilar fasilitas latihan (*training facility*);
7. Bagaimana evaluasi kebijakan olahraga prestasi di Jawa Tengah ditinjau dari pilar pengembangan SDM Pelatih (*coaching provision & coach development*);
8. Bagaimana evaluasi kebijakan olahraga prestasi di Jawa Tengah ditinjau dari pilar sistem kompetisi (*competition structure*); dan
9. Bagaimana evaluasi kebijakan olahraga prestasi di Jawa Tengah ditinjau dari pilar penelitian ilmiah dan inovasi (*scientific sport science*)?.

1.5. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian berdasarkan rumusan penelitian secara umum adalah untuk mengevaluasi kebijakan pengembangan olahraga prestasi di Jawa Tengah terhadap kesuksesan olahraga elit yang ada di Jawa Tengah dan secara khusus penelitian memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Melakukan evaluasi kebijakan olahraga prestasi di Jawa Tengah ditinjau dari pilar pendanaan (*Financial Support*);
2. Melakukan evaluasi kebijakan olahraga prestasi di Jawa Tengah dari pilar tata kelola organisasi dan struktur kebijakan (*governance, organization & structure of policy*);
3. Melakukan evaluasi kebijakan olahraga prestasi di Jawa Tengah ditinjau dari pilar pondasi dan partisipasi (*foundation & participation*);
4. Melakukan evaluasi kebijakan olahraga prestasi di Jawa Tengah ditinjau dari pilar identifikasi dan pengembangan bakat (*talent identification &*

development system);

5. Melakukan evaluasi kebijakan olahraga prestasi di Jawa Tengah dari pilar dukungan atlet dan pasca karir atlet (*athlete & post career support*);
6. Melakukan evaluasi kebijakan olahraga prestasi di Jawa Tengah ditinjau dari pilar fasilitas latihan (*training facility*);
7. Melakukan evaluasi kebijakan olahraga prestasi di Jawa Tengah dari pilar pengembangan SDM Pelatih (*coaching provision & coach development*);
8. Melakukan evaluasi kebijakan olahraga prestasi di Jawa Tengah ditinjau dari pilar sistem kompetisi (*competition structure*); dan
9. Melakukan evaluasi kebijakan olahraga prestasi di Jawa Tengah ditinjau dari pilar penelitian ilmiah dan inovasi (*scientific sport science*).

1.6. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini secara umum diharapkan dapat dimanfaatkan oleh pihak terkait seperti instansi pemerintah, Komite Olahraga Nasional Indonesia, induk cabang olahraga dan lembaga terkait dalam penyelenggaraan kebijakan olahraga.

1.6.1. Manfaat Teoritis

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini yaitu menjadi sebuah kajian, evaluasi dan sintesa mengenai pengembangan olahraga elit yang ada di Jawa Tengah dalam konteks *input*, *throughput*, *output* dan *outcome* menggunakan perspektif kebijakan anggaran, tata kelola organisasi dan struktur kebijakan, pondasi dan partisipasi, sistem identifikasi dan pengembangan bakat, dukungan bagi insan/pelaku olahraga, fasilitas latihan, kompetisi dan dukungan penelitian ilmiah. Penelitian ini secara teoritis juga diharapkan untuk memberikan konsep keilmuan berkaitan dengan pengembangan olahraga elit berdasarkan faktor-faktor yang mempengaruhi pencapaian prestasi secara internasional (*elite Sport*).

1.6.2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian secara praktis diharapkan dapat dimanfaatkan sebagai referensi bagi pelaku, pembina dan pengelola olahraga baik secara personal

maupun kolektif diantaranya kepada:

1. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah;
2. Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Jawa Tengah;
3. KONI Provinsi Jawa Tengah;
4. Pengurus provinsi cabang olahraga dan organisasi keolahragaan.

Secara praktis hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi kerangka acuan dalam merumuskan kebijakan pengembangan olahraga dalam lingkup mikro maupun makro.

1.7. Sistematika Penulisan

Adapun kerangka penelitian dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: Pada bagian struktur organisasi penelitian ini merupakan penjabaran terkait dengan urutan penyajian penelitian pada setiap bab dan sub bab, yang dimulai dari Bab I hingga Bab V.

Bab I memuat sekaitan dengan pendahuluan penelitian yang mengungkap mengenai permasalahan penelitian serta dasar penelitian yang menjadi isu utama. Adapun secara struktur terdiri dari (1) latar belakang masalah; (2) identifikasi masalah; (3) cakupan penelitian; (4) rumusan masalah; (5) tujuan penelitian; (6) manfaat penelitian; (7) sistematika penulisan.

Bab II memuat terkait dengan teori, konsep, definisi hingga pada landasan teoritis terkait dengan analisis kebijakan olahraga prestasi yang diteliti. Pada strukturnya terdiri dari pembahasan mengenai teori dan konsep yang berkaitan dengan tema penelitian yakni kajian teoritis tentang hakikat kebijakan olahraga, kebijakan pembangunan olahraga, program pengembangan olahraga prestasi dan evaluasi kebijakan *SPLISS Model*.

Bab III memuat mengenai runtutan metode penelitian yang dilaksanakan oleh peneliti. Pada penelitian ini peneliti menggunakan pendekatan deskriptif kuantitatif. Adapun dalam struktur penulisannya antara lain: 1) Desain Penelitian; (2) Cetak Biru Penelitian (*Blueprint*); (3) Sumber Data Penelitian; (4) Teknik Pengumpulan Data dan Instrumen Penelitian (5) Analisis Data.

Bab IV memuat hasil temuan penelitian beserta pembahasannya yang

merujuk pada model evaluasi kebijakan *SPLISS Model*. Secara struktur terdiri dari: (1) Temuan Penelitian; (2) Pembahasan penelitian menggunakan kerangka evaluasi *SPLISS Model Input, Throughput, Output* dan *Outcome*.

Bab V memuat kesimpulan dari penelitian yang telah dilaksanakan dengan mengacu pada hasil temuan dan pembahasan penelitian. Adapun struktur pada Bab V, antara lain: (1) Simpulan; (2) Implikasi; (3) Rekomendasi.